

# UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DESA (CAKADES) DALAM RANGKA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) DI WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

**Ahmad**

Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol Padang

Email: m.dhuzent@yahoo.com

## **Abstrak**

*Kepala desa yang merupakan pelaksana pembangunan di tingkat pedesaan mempunyai tantangan besar, di samping bertanggungjawab terhadap stabilitas keamanan desa juga harus mampu untuk menerjemahkan dengan baik program-program daerah dalam kegiatan pembangunan di desa baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sosok kepala desa yang mumpuni tentu harus memiliki kompetensi yang mumpuni pula, agar terjaring calon kepala desa yang berkompeten maka sudah menjadi kewajiban bahwa syarat menjadi kepala desa harus memenuhi standar kompetensi sebagai seorang kepala desa maka diperlukan adanya uji kompetensi bagi bakal calon kepala desa se-kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Kompetensi Kepala Desa sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) di wilayah kabupaten Indragiri Hilir.*

**Kata Kunci :** Kompetensi Kepala Desa, SDM, Wilayah

## **Abstract**

*The village head who is the executor of development at the village level has a big challenge in addition to responsibility for security and stability village is also able to translate well regional programs in rural development activities in both physical and non-physical development. The figure of the village head who qualified would have to be competent qualified anyway, so terjaringnya candidates for village chiefs competent then it becomes reasonableness of that requirement into the village head must meet the standards of competence as a village head so it needed the competency test for prospective village heads in the district Indragiri Hilir in improving competence village chief as improving the quality of Human Resources (HR) in Indragiri Hilir district.*

**Keywords:** Competence Village Head, HR, Region

## **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat sebagai : (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif

dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor, dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud, dan non spasial).

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang seharusnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia,

dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sehingga harus disadari bahwa hakekat dari pembangunan nasional secara komprehensif adalah dengan meletakkan pondasi atau penopang yang kokoh pada pembangunan di tingkat desa.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka seiring dengan bergulirnya era desentralisasi dan pemberlakuan otonomi daerah seharusnya mengalir pula kewenangan yang lebih luas kepada perangkat desa untuk berpartisipasi secara langsung dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi ini hanya akan terwujud apabila otonomi daerah terus mengalir menjadi otonomi desa dan akhirnya menjadi otonomi rakyat.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai bentuk implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka dilegitimasikan kekuasaan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri (Otonomi Desa). Hal ini ditambah dengan dihargainya faktor-faktor heterogenitas, asal-usul, nilai-nilai tradisional, dan kearifan lokal [1;2;3].

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten di antara 12 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Riau. Dalam sejarah perkembangannya merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 1965. Hingga saat ini Administrasi Pemerintahan sudah memiliki 20 Kecamatan 236 Desa dan kelurahan dengan pusat Pemerintahan berada di Tembilahan. Dalam rangka percepatan pembangunan di pedesaan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya menggalakkan berbagai program di pedesaan salah satunya Program Desa Maju Inhil Jaya. Program pemerintah yang telah berjalan ini tentu perlu dukungan dari bawah agar tercapai tujuan yang telah direncanakan.

Kepala desa yang merupakan pelaksana pembangunan di tingkat pedesaan mempunyai tantangan besar di samping bertanggungjawab terhadap stabilitas keamanan desa juga harus mampu untuk menerjemahkan dengan baik program-program daerah dalam kegiatan pembangunan di desa baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Sosok kepala desa yang mumpuni tentu harus memiliki kompetensi yang mumpuni pula, agar terjaringnya calon kepala desa yang berkompeten maka sudah menjadi kewajiban bahwa syarat menjadi kepala

desa harus memenuhi standar kompetensi sebagai seorang kepala desa. Dari uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukan uji kompetensi bagi bakal calon kepala desa se-kabupaten Indragiri Hilir [4].

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Umum

Sejarah panjang tentang pemerintahan desa sebenarnya sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka, dimana masing-masing daerah adat telah di akui keberadaannya oleh pemerintah Hindia Belanda.

### 2.2. Landasan Teori

Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :

#### 2.2.1. Economies of scale

Merupakan penyerahan urusan itu akan menciptakan efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam penyelenggaraannya. Ini berkaitan dengan *economies of scale* (skala ekonomis) dalam pemberian pelayanan. Untuk itu harus ada kesesuaian antara skala ekonomis dengan *catchment area* (cakupan daerah pelayanan). Persoalannya adalah sejauh mana skala ekonomis itu sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi Pemda yang sudah ada. Makin luas wilayah yang diperlukan untuk mencapai skala ekonomis akan makin tinggi otoritas yang diperlukan. *Akuntabilitas* : bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pemda pada masyarakat. Ini berarti bagaimana mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Makin dekat unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan makin mendukung akuntabilitas.

#### 2.2.2. Eksternalitas

Merupa kandampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang memerlukan pelayanan tersebut. Eksternalitas sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut.

### **2.2.3. Uji Kompetensi**

Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi.

### **2.2.4. Kompetensi Kepala Desa**

Kompetensi kepala desa, didefinisikan sebagai kemampuan kepala desa dalam menghimpun, menggerakkan dan mengarahkan potensi-potensi dalam masyarakat desa yang dipimpinnya untuk kepentingan pembangunan desa.

### **2.2.5. Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [1;2].

### **2.2.6. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi [5;6].

### **2.2.7. Peningkatan SDM**

Peningkatan SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, pendidikan juga merupakan upaya meningkatkan derajat kompetensi dengan tujuan agar pesertanya memiliki kompetensi dan pengetahuan terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, pendidikan yang diselenggarakan seharusnya juga memberi bekal-bekal kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu yang dibutuhkan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan [5;6].

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai pembinaan pegawai fungsional serta masalah-masalah yang ditemukan serta jalan keluarnya dalam rangka tercipta optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik yang berdaya guna dan berhasil guna. Karena tujuan tersebut, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif [7].

### **3.2. Operasionalisasi Variabel/Fokus Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maksud dan manfaat penelitian yang telah dikemukakan, maka variabel atau fokus penelitian ini ialah "kompetensi kepala desa", dan "Peningkatan Sumber Daya di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir". Berdasarkan definisi konseptual yang telah dikemukakan dalam uraian tinjauan pustaka, maka disusun definisi operasional dari variabel atau fokus penelitian tersebut sebagai berikut:

Kompetensi kepala desa, didefinisikan sebagai kemampuan kepala desa dalam menghimpun, menggerakkan dan mengarahkan potensi-potensi dalam masyarakat desa yang dipimpinnya untuk kepentingan pembangunan desa. Peningkatan Sumber Daya di wilayah kabupaten Indragiri Hilir merupakan keniscayaan yang harus dimiliki oleh para calon kepala desa untuk menunjang tugas dan tanggung jawab yang akan di emban dalam menjabat sebagai peminan desa

### **3.3. Jenis dan Sumber Data/Informan**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para responden/informan yang ditetapkan, sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Pengambilan informan/responden dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling atau pengambilan sampel bertujuan. Adapun yang dijadikan sumber data (reponden/informan) Peserta tes uji kompetensi Calon Kepala Desa yaitu sebanyak 70 orang.

### 3.4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Uji kompetensi yang dilakukan mengacu pada Peraturan Bupati No. 35 Inhil Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terdiri : Tes tertulis, Ujian lisan (wawancara/interview), tes pidato dan baca Al-Qur'an.

#### 3.4.1. Ujian Tertulis

Ujian tertulis digunakan untuk mengukur kompetensi pengetahuan pancasila dan UUD 1945, pemerintahan desa, pemberdayaan desa, pemerintahan umum serta pengetahuan tambahan dan agama.

Tes tertulis yang dilakukan oleh peserta akan dinilai berdasarkan bobot dan rating kemudian dimasukkan kedalam rating level kompetensi, untuk level kompetensi tes tertulis berada pada level 2.

**Tabel 1.** Form penilaian ujian tertulis

NO	KOMPETENSI	LEVEL	DEFINISI LEVEL
1.	Pengetahuan Pancasila, UUD 1945, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Desa, Pemerintahan Umum, Pengetahuan Tambahan dan Agama	0	15 <
		1	15 - 28
		2	29 - 42
		3	43 - 56
		4	57 - 70
		5	71 - 84
	6	85 - 100	

#### 3.4.2. Ujian Lisan

Ujian Lisan terdiri atas : wawancara, pidato dan baca al-Qur'an.

#### 1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali kompetensi :

- Mengolah diri (Inisiatif) pada level 2
- Mengolah Tugas (Komunikasi lisan dan pengambilan keputusan) pada level 2 dan 3
- Mengelola sosial budaya (Interaksi sosial) pada level 3

- Hasil tes wawancara dilakukan penilaian berdasarkan level kompetensi yang telah dibuat.

**Tabel. 2** Form Penilaian Tes Wawancara

NO	KOMPETENSI	LEVEL	DEFINISI LEVEL
A 1	MENGELOLA DIRI Inisiatif (ini) Kemampuan mengambil langkah-langkah aktif tanpa menunggu perintah untuk tujuan organisasi	0	Melakukan pekerjaan dengan menunggu perintah
		1	Menyelesaikan tugas sebagai rutiintas sesuai dengan prosedur apa adanya
		2	Melakukan langkah aktif dalam proses penyelesaian pekerjaan
		3	Melakukan tindakan konstruktif untuk mendukung situasi kerja yang kondusif
		4	Melakukan berbagai tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi
		5	Mengidentifikasi upaya penyelesaian masalah yang akan muncul dimasa depan
6	Mengembangkan ide baru untuk menyelesaikan tugas yang lebih baik		

#### 2. Pidato

Mengukur sejauh mana kemampuan berpidato secara etika, gesture dan penguasaan materi. Tes pidato akan dinilai berdasarkan level kompetensi yang telah ditentukan.

**Tabel. 3** Form Penilaian tes pidato

NO	KOMPETE NSI	LEVEL	DEFINISI LEVEL
1.	Kemampuan berpidato baik secara etika, gestur dan penguasaan materi.	0	Tidak bisa berpidato
		1	Komunikasi kurang jelas, tidak beretika, intonasi suara, gestur tubuh dan penguasaan materi kurang baik
		2	Komunikasi kurang jelas, etika cukup baik, intonasi suara kurang baik, gestur tubuh dan penguasaan materi cukup baik
		3	Komunikasi cukup jelas, beretika, intonasi suara dan gestur tubuh cukup baik dan penguasaan materi cukup baik
		4	Komunikasi jelas, beretika, intonasi suara baik dan gestur tubuh baik serta cukup baik dalam penguasaan materi
		5	Mampu berkomunikasi dengan baik, beretika, intonasi suara sangat baik dan gestur tubuh baik serta menguasai materi
		6	Mampu berkomunikasi dengan sangat baik, beretika, intonasi suara sangat baik

NO	KOMPETE NSI	LEVEL	DEFINISI LEVEL
			dan gestur tubuh sangat baik serta menguasai materi.

### 3. Baca Al-quran

Mengukur kemampuan membaca Al-qur'an. Tes baca Al-qur'an akan dinilai berdasarkan level kompetensi yang dibuat pada level 2.

**Tabel 4.** Form Penilaian Tes Baca Al-qur'an.

NO	KOMPE TENSI	LEVEL	DEVENISI LEVEL
1.	Membaca Al-Qur'an	0	Tidak bisa baca
		1	Mengenal huruf al-qur'an tapi tidak bisa membaca al-qur'an
		2	Bisa membaca al-qur'an tapi terbata-bata
		3	Lancar membaca tapi tidak fasih
		4	Lancar membaca dan fasih
		5	Fasih membaca tapi tidak bertajwid
		6	Fasih membaca dan bertajwid .

#### 3.4.3. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indragiri Tembilahan

#### 3.4.4. Pelaksana Kegiatan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim independen .

Tugas dan Wewenang Tim Independen adalah :

a. Memberikan materi ujian Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa Meliputi :

- 1) Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- 2) Bidang Pemerintahan desa, Bidang pemberdayaan desa, bidang pemerintahan umum.
- 3) Pengetahuan tambahan seperti adat istiadat dan pengetahuan agama.
- b. Ujian lisan Bakal Calon Kepala Desa meliputi wawancara , kemampuan berpidato dan membaca al-Qur'an.
- c. Hasil ujian Bakal Calon Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- Berdasarkan rumusan masalah Apakah Bakal Calon Kepala Desa Memiliki Kompetensi?
- Bagaimana peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir?

##### 4.1. Apakah Bakal Calon Kepala Desa Memiliki Kompetensi?

Berdasarkan hasil uji tes kompetensi bakal calon kepala desa bahwa calon kepala desa di kabupaten Indragiri Hilir yang dinyatakan memenuhi syarat kompetensi 35,7 % (25 orang) masih memenuhi syarat kompetensi 38,9 % (30 orang) dan tidak memenuhi syarat kompetensi 21,4 % (15 orang).

##### 4.2. Bagaimana peningkatan Sumberdaya Manusia di wilayah Kabupaten Indragiri hilir ?

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi Calon Kepala Desa? Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir? Adalah dengan melakukan uji kompetensi.

Peserta dalam kegiatan Uji Kompetensi ini adalah peserta Bakal Calon Kepala Desa Se-Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki bakal calon lebih dari 5 orang setiap desanya. Adapun lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.** Sebaran Sampel

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH CALON
1	Tanjung Simpang	Pelangiran	6
2	Pulau Palas	Tembilahan Hulu	6

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH CALON
3	Pengalihan	Keritang	6
4	Sungai Rukam	Enok	6
5	Sungai Undan	Reteh	6
6	Teluk Kelasa	Keritang	7
7	Sungai Piyai	Kuala Indragiri	7
8	Kemuning Tua	Kemuning	7
9	Sungai Gantang	Kempas	7
10	Belaras	Mandah	6
11	Simpang Gaung	Gaung	6
T O T A L			70

##### 4.3. Pemetaan Kompetensi

Hasil tes tertulis dan tes lisan yang telah di lakukan direkapitulasi kedalam hasil pemetaan kompetensi seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 6.** Pemetaan Kompetensi

N O	ASPEK-ASPEK	RATING			
		1	2	3	4
A	MENGELOLA DIRI				
1	Inisiatif (ini)				
B	MENGELOLA TUGAS				
2	Komunikas i Lisan (Komlis)			X	
3	Pengambil an Keputusan				
C	MENGELOLA SOSIAL BUDAYA				
4	Interaks i Sosial				
D	KEMAMPUAN BERPIDATO				
5	Kemampu an berpidato baik secara etika, gestur dan penguasaa n materi				X
E	BACA AL-QUR'AN				
6	Membaca al-qur'an			X	

NO	ASPEK-ASPEK	RATING			
		1	2	3	4
F	TES TERTULIS				
7	Pengetahuan Pancasila, UUD 1945, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Desa, Pemerintahan Umum, Pengetahuan Tambahan dan Agama			X	

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- [3] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- [4] Peraturan Bupati No. 35 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- [5] Alwi, Syafaruddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Strategi Unggulan Kompetitif*. BPFE. Yogyakarta, 2001
- [6] Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta. 2001.
- [7] Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Referensi, Jakarta: 2013

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 5.1. Kesimpulan

Uji kompetensi bertujuan untuk menilai kompetensi masing-masing bakal calon kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan standar yang telah ditentukan. Adapun peserta dalam uji kompetensi ini berjumlah 70 orang yang tersebar di 11 desa. Hasil uji kompetensi dirangking dengan melihat hasil akhir dari proses uji kompetensi tersebut, maka dinyatakan bahwa memenuhi syarat kompetensi 35,7 % (25 orang) masih memenuhi syarat kompetensi 38,9 % (30 orang) dan tidak memenuhi syarat kompetensi 21,4 % (15 orang).

##### 5.2 Saran

Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana dalam sejarah pemilihan kepala desa di Indonesia. Banyak hal-hal positif yang dapat diambil dan digali secara maksimal di antaranya potensi dan kompetensi bakal calon kepala desa dapat diukur dengan standar pengetahuan yang dimiliki untuk mengikuti pesta demokrasi ditingkat desa. Berdasarkan hasil uji kompetensi perlu dilakukannya pembinaan terhadap kepala desa terpilih agar kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang kepala desa terpenuhi sehingga memiliki kualifikasi dan sumberdaya manusia (SDM) yang mumpuni.